PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR TERKAIT MEKANISME PENAGIHAN PIUTANG OLEH KREDITUR DALAM PERJANJIAN PEER TO PEER LENDING

Kadek Heru Setiawan, Si Ngurah Ardhya, Dewa Gede Sudika Mangku

Universitas Pendidikan Ganesha

e-mail : heru@undiksha.ac.id, ngurah.ardhya@undiksha.ac.id, sudika.mangku@undiksha.ac.id

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami (1) pengaturan hukum terkait mekanisme penagihan piutang *peer to peer lending* dan mengetahui (2) perlindungan hukum terhadap debitur dalam hal penagihan yang dilakukan secara melawan hukum. Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan yaitu jenis Penelitian hukum normatif. Sumber bahan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Tehnik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian normatif dilakukan dengan studi keperpustakaan terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan huku, primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum terseir. Adapun hasil penelitian yaitu, layanan *Peer to peer lending* adalah perjanjian pinjam-meminjam uang yang dilakukan secara elektronik. Pengaturan mekanisme penagihan dalam perjanjian *peer to peer lending* didalam perspektif hukum perdata tidak diatur secara jelas mengenai pengaturan penagihan hutang dalam perjanjian *peer to peer lending*, namun dalam hukum perdata diatur mengenai penagihan hutang yang dapat dilakukan melalui pengadilan yaitu, pada pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang pinjam meminjam. Untuk perlindungan terhadap debitur dalam hal penagihan yang dilakukan secara melawan hukum dalam Perlindungan data pribadi diatur dalam Pasal 26 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Kata Kunci : Peer to peer, Debitur, Normatif, mekanisme, Perdata

Abstract

The purpose of this research is to know and understand (1) the legal arrangements related to peer to peer lending receivables collection mechanisms and to know (2) the legal protection of debtors in the case of billing that is carried out unlawfully. In this research, the type of research used is normative legal research. Source of research material used in this study is secondary data. The technique of collecting legal materials in normative research is carried out by means of library research on legal materials, both legal materials, primary, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The results of the study are that Peer to peer lending services are electronic money lending agreements. Arrangements for the collection mechanism in peer to peer lending agreements in the perspective of civil law are not clearly regulated regarding debt collection arrangements in peer to peer lending agreements, but in civil law it is regulated regarding debt collection that can be carried out through the court, namely, in article 1754 of the Book of Laws Civil Law regarding lending and borrowing. For protection of debtors in terms of billing that is carried out unlawfully in the protection of personal data is regulated in Article 26 POJK Number 77/POJK.01/2016 Concerning Information Technology-Based Borrowing and Borrowing Services.

Keywords : Peer to peer, Debtor, Normative, mechanism, Civil

PENDAHULUAN

Bangsa Indonesia sedang giat melaksanakan pembangunan disegala bidang. Komponen pembangunan tersebut meliputi pembangunan sumber daya alam, tenaga kerja dan modal yang satu sama lainnya saling mendukung sebagai satu kesatuan, sehingga perlu dilaksanakan pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan dengan berlandaskan demokrasi ekonomi dan prinsip kebersamaan.

Seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk di Indonesia, tentu akan ada juga berbagai kebutuhan yang baru ikut bermunculan, apalagi kebutuhan finansial yang semakin beragam merupakan salah satu faktornya, maka dari itu bank hadir menjadi salah satu sumber solusi ketika masyarakat membutuhkan suntikan dana pinjaman demi memenuhi kebutuhan ekonomisnya, namun tidak semua kalangan masyarakat menjadikan bank sebagai salah satu solusi untuk pemenuhan kebutuhan ekonomis karena terkadang ada juga masyarakat yang enggan meminjam uang di bank karena pemberlakuan suku bunga dan kurangnya pemahaman tentang prosedur meminjam yang dianggap rumit dan limit pencairan yang lama.

Salah satu pengembangan tersebut terletak pada pembangunan sistem keuangan yang berbasis elektronik yang di kenal dengan istilah finance technology (selanjutnya disingkat *Fintech*). Kemajuan teknologi menuntut kehidupan masa kini semakin cepat dan praktis. Berbagai jenis aplikasi diciptakan sebagai teknologi yang fungsinya mampu menggantikan berbagai aktivitas manusia. Beberapa tahun belakangan ini bidang *Fintech* mengalami perkembangan yang signifikan. *Fintech* menempatkan teknologi sebagai dasar bisnis dibidang keuangan (Abdul & Teguh, 2015). Beberapa produk hasil *Fintech* telah dinikmati masyarakat, diantaranya : Mobile Banking, Rekening Ponsel, bahkan e-banking. Peranan internet dalam teknologi informasi telah digunakan untuk mengembangkan industri keuangan (*financial industry*) melalui modifikasi dan efisiensi layanan jasa keuangan yaitu dikenal dengan istilah *peer to peer lending* (pinjaman tanpa agunan) (Situmorang, 2020:53).

Fintech atau singkatan dari (*Financial technology*) Secara sederhana, merupakan wujud pemanfaatan dari perkembangan teknologi informasi untuk meningkatkan layanan di industri keuangan khususnya dalam pinjam meminjam uang. Definisi lainnya dari *Fintech* adalah variasi model bisnis dan perkembangan teknologi yang memiliki potensi untuk meningkatkan indsutri layanan keuangan (Ana, dkk, 2020:2). Salah satu *Fintech* yang sedang trend dan banyak diperbincangkan akhir-akhir ini adalah *Fintech* jenis *Peer to peer* (P2P). *Fintech peer to peer lending* merupakan alternatif potensial sumber pembiayaan bagi masyarakat terutama untuk pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) (Yolandan, 2020:42).

Dalam pelaksanaan operasionalnya, sistem dalam *Fintech peer to peer lending* sangat mudah untuk dijangkau maupun diakses baik oleh pemberi pinjaman maupun penerima pinjaman. *Financial technology peer to peer lending* merupakan salah satu bentuk inovasi teknologi di bidang layanan jasa keuangan khususnya pinjaman/pembiayaan/pendanaan yang menghilangkan hambatan-hambatan yang sering dialami masyarakat. Saat ini dengan hadirnya *peer to peer lending* ini masyarakat dapat dengan mudah mengakses pinjaman/pembiayaan untuk meningkatkan usaha yang dimiliki atau kebutuhan sehari-hari yang harus dipenuhi. Bukan hanya untuk mendapatkan keuntungan atau pendapatan yang besar bagi perusahaan start-up namun, keberadaannya juga ternyata bisa meningkatkan taraf hidup serta daya beli masyarakat banyak (Aprita, 2021:39).

Mengenai perjanjian pinjam-meminjam sendiri, pengaturannya terdapat dalam Buku ke III Bab XIII KUHPerdara. Pinjam meminjam menurut Pasal 1754 KUHPerdara adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah uang yang sama dengan jenis dan mutu yang sama pula. Ketentuan Pasal 1754 KUHPerdara tersebut menunjukkan bahwa seseorang yang meminjamkan sejumlah uang atau barang tertentu kepada pihak lain, ia akan memberi kembali sejumlah uang yang sama sesuai dengan persetujuan yang disepakati. Dari pengertian tersebut diatas kiranya

dapat dilihat beberapa unsur yang terkandung dalam suatu perjanjian pinjam meminjam diantaranya :

1. Adanya para pihak
2. Adanya persetujuan.
3. Adanya sejumlah barang tertentu.
4. Adanya pengembalian Pinjaman.

KUHPerdata menyebut perjanjian dengan istilah persetujuan. Menurut Pasal 1313 KUHPerdata, pengertian persetujuan dapat didefinisikan sebagai berikut “Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana 1 (satu) orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap 1 (satu) orang lain atau lebih”. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan, antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan atau kalimat-kalimat yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau dibuat dalam tulisan oleh para pihak yang membuat perjanjian menerbitkan perikatan.

Peer to peer lending ini telah banyak meresahkan masyarakat, dimana sistem penagihan yang sangat tidak wajar dan kadang sangat brutal. Hal tersebut juga sangat disayangkan ketika regulasi yang mengatur tentang *peer to peer lending* belum memadai, sehingga OJK sebagai lembaga yang berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap lembaga keuangan yang dalam melakukan pengawasan dan penindakan tidak dapat dilakukan secara maksimal.

OJK adalah lembaga negara yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang memiliki fungsi tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyelidikan terkait kegiatan jasa keuangan bank dan non bank. Wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya beralih dari menteri keuangan dan badan pengawasan pasar modal dan lembaga keuangan ke OJK.

Dalam pelaksanaan *peer to peer lending* (pinjaman tanpa agunan) tentu diperlukan adanya regulasi yang mengatur sebagai bentuk pengawasan dan kepastian hukum oleh lembaga yang berwenang, karena dengan adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan juga memberikan keamanan hukum bagi individu maupun badan hukum. Dengan mempertimbangkan hukum, artinya memberi kekuatan yang memberikan perlindungan terhadap kemungkinan pelanggaran hak dan sebagainya terhadap semua pihak yang beritikad buruk. Lembaga Otoritas Jasa Keuangan telah mengeluarkan Peraturan No.77/POJK.01/2016 yang salah satunya mengatur tentang regulasi mendirikan kegiatan layanan.

Namun, meskipun telah berada dibawah pengawasan OJK beberapa penyedia jasa pinjaman online masih saja bisa lolos dari pengawasan ketat OJK terkait mekanisme penagihan piutang. Banyaknya kasus-kasus terkait mekanisme penagihan piutang dalam *peer to peer lending* yang tengah marak akhir-akhir ini tentunya pihak masyarakatlah yang menjadi korban dari kurangnya aturan terkait mekanisme penagihan tersebut. Akhir-akhir ini isu hukum yang banyak menjadi perhatian para pengguna layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi semakin beragam, salah satunya yakni terkait dengan kontrak pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi tergolong sebagai kontrak konsumen atau kontrak komersial.

Berdasarkan hal tersebut, maka dibutuhkan perlindungan hukum bagi konsumen pengguna jasa *peer to peer lending*. Selanjutnya dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen diberikan definisi perlindungan konsumen adalah: “Segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”. Istilah perlindungan konsumen berkaitan dengan perlindungan hukum. Oleh karena itu, perlindungan konsumen mengandung aspek hukum. Adapun materi yang mendapatkan perlindungan itu bukan sekadar fisik, melainkan terlebih hak-haknya yang bersifat abstrak. Dengan kata lain, perlindungan konsumen sesungguhnya identik dengan perlindungan yang diberikan hukum terhadap hak-hak konsumen (Rudy, 2016:13). Hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen adalah dua bidang hukum yang sulit dipisahkan dan ditarik batasnya. Aspek

perlindungannya misalnya bagaimana cara mempertahankan hak-hak konsumen terhadap gangguan pihak lain.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dari itu perlu diadakannya penelitian lebih lanjut terkait permasalahan tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Terkait Mekanisme Penagihan Piutang Oleh Kreditur Dalam Perjanjian Peer To Peer Lending”**.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian hukum normatif (*normative law research*) penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji suatu sistem perundang-undangan yang berlaku atau yang digunakan dalam suatu kasus dan permasalahan-permasalahan yang ada, sumber penelitian hukum normatif ini tidak hanya menggunakan peraturan perundang-undangan saja, tetapi juga dapat berupa bahan pustaka lainnya. Jenis pendekatan dalam penelitian hukum normatif terdiri dari beberapa jenis yaitu, pendekatan undang-undang (*statue approach*), pendekatan konseptual (*Conseptual approach*), pendekatan sejarah hukum (*historical approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*) (Diantha, 2016 : 156).

Dalam penelitian hukum normatif sumber data hanya diperoleh dari sumber data sekunder. Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari literatur perpustakaan atau literatur lainnya yang berhubungan dengan objek penelitian (Ishaq, 2017 : 67-68). Dalam penelitian hukum normatif sumber data hanya diperoleh dari sumber data sekunder. (Ishaq, 2017 : 67-68).

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian normatif dilakukan dengan studi kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan huku, primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier (Fajar 2015 :160)

Teknik analisis hukum yang digunakan peneliti yaitu, teknik deskriptif yang merupakan metode penelitian dengan menggambarkan dan menginterpretasi objek atau fenomena sesuai dengan apa adanya yang diperoleh dari penelitian secara kepustakaan yang nantinya pemaparan hasil penelitian. Bahan hukum primer dan sekunder yang dikumpulkan kemudian diberikan penilaian berupa evaluasi, serta dilakukan interpretasi dan selanjutnya diajukan argumentasi. Dari hal tersebutlah ditarik kesimpulan dan dilakukan pembahasan secara deskriptif (Diantha, 2016 : 152).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Mekanisme Penagihan Dalam Perjanjian *Peer to peer lending*

Kemajuan industri *Peer to peer lending* di dunia akhirnya mendorong para pakar hukum Indonesia untuk membuat suatu regulasi yang mampu menampung segala aspek perbankan dan keuangan digital. *Peer to peer lending* merupakan industri yang dapat melewati ruang batas yuridiksi karena dapat diakses dimanapun dan kapanpun. (Rahmi. A, 2018:331)

Perjanjian layanan *Peer to peer lending* adalah perjanjian pinjam-meminjam uang yang dilakukan secara elektronik. Menurut Edmon Makarim, kontrak elektronik adalah sebagai perikatan ataupun hubungan hukum yang dilakukan secara elektronik dengan memadukan jaringan dari sistem informasi yang berbasis komputer dengan melalui sistem komunikasi yang berdasarkan atas jaringan dan jasa telekomunikasi dan difasilitasi oleh komputer global internet (*network of network*). Dalam perjanjian pemberian pinjaman antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman layanan *Peer to peer lending* dituangkan dalam dokumen elektronik, sebagaimana termuat dalam Pasal 20 POJK No.77 Tahun 2016.

Penerima pinjaman yang akan melakukan pinjaman terlebih dahulu mengunduh aplikasi *Peer to peer lending*, dan mengunggah semua dokumen yang dibutuhkan. Dokumen tersebut berisi tujuan pinjaman dan laporan keuangan dalam jangka waktu tertentu. Selain itu penyelenggara *Peer to peer lending* juga memberlakukan sistem yang sama kepada pihak pemberi

pinjaman, jadi kredibilitas pencari pinjaman maupun investor akan terjamin. (Azmi Aulia Rahmi, 2018 : 332)

Kemudian mekanisme yang dilakukan pihak perusahaan apabila terjadi gagal bayar oleh penerima pinjaman, terlebih dahulu penerima pinjaman akan dihubungi oleh pihak penyelenggara, apabila sampai dua bulan tidak ada kepastian untuk mengembalikan pinjamannya, maka penyelenggara melalui anggotanya akan mendatangi rumah penerima pinjaman, dan apabila masih tidak ada titik terang sampai sembilan bulan, penyelenggara layanan akan bekerjasama dengan pihak asuransi sebagai pihak penjamin, kemudian membayar kerugian yang diterima oleh pemberi pinjaman sebesar 70% dana yang sebelumnya dipinjamkan kepada pihak penerima pinjaman. (Arief Syaifudin. 2020 : 416)

Karena belum adanya Undang-undang yang untuk mengatur tentang mekanisme penagihan pinjam meminjam uang dalam *Peer to peer lending* maka, terjadilah kekosongan norma pada pengaturan mekanisme penagihan *Peer to peer lending*. Kekosongan norma adalah keadaan dimana ketiadaan norma hukum dalam pengaturan suatu hal. Berikut adalah beberapa penjabaran mengenai adanya kekosongan norma dalam mekanisme penagihan *Peer to peer lending* dari beberapa peraturan yang ada di Indonesia :

1. Dalam Perspektif Hukum Perdata

Pinjam-meminjam uang secara konvensional pada umumnya dilakukan oleh subjek hukum perdata yang dalam hal ini orang pribadi maupun badan hukum dengan lembaga keuangan yang melakukan pelayanan peminjaman uang seperti perbankan dan pegadaian. Subjek hukum perdata biasanya pergi secara langsung ke lembaga keuangan yang melakukan pelayanan peminjaman uang untuk melakukan transaksi peminjaman uang.

Kegiatan demikian didasari atas pasal 1754 kitab undang-undang Hukum perdata yang menjelaskan bahwa perjanjian pinjam-meminjam merupakan perjanjian yang membuat pihak pertama menyerahkan sejumlah uang atau barang yang dapat habis terpakai kepada pihak kedua dengan syarat bahwa pihak kedua tersebut akan mengembalikan uang atau barang sejenis kepada pihak pertama dengan jumlah dan keadaan yang sama. Dalam perjanjian pinjam-meminjam uang secara konvensional ini, terdapat dua pihak yang menjadi subjek perjanjian pinjam-meminjam, yakni pemberi pinjaman selaku kreditur dan penerima pinjaman selaku debitur.

Perjanjian pinjam-meminjam dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diatur dalam Pasal 1313 dimana dalam hal ini menyebutkan bahwa perjanjian merupakan suatu perbuatan yang mana antara satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Adapun pengaturan mengenai pinjam meminjam diatur didalam pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dimana dalam hal ini menjelaskan bahwa pinjam meminjam merupakan suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir itu akan mengembalikan sejumlah yang sama dari jenis dan mutu yang sama pula. (Mariam Darus,1996:323).

Perjanjian yang dilakukan oleh para pihak harus berdasarkan adanya kesepakatan para pihak. Kesepakatan itu nantinya akan dituangkan dalam perjanjian dan sekaligus menjadi undang-undang bagi para pihak, sebagaimana pada Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (Mariam Darus,1996:323).

Dalam perspektif hukum perdata tidak ada undang-undang yang mengatur mengenai mekanisme penagihan hutang secara signifikan dan terperinci dalam perjanjian *Peer to peer lending*. Seperti yang telah dijabarkan diatas, dalam hukum perdata hanya terdapat pengaturan mengenai perjanjian pinjam meminjam yang diatur dalam pasal 1754. Namun, apabila dilihat dari perspektif hukum perdata kita dapat mengadopsi beberapa tata cara penagihan hutang-piutang yang ada. penagihan terhadap utang dapat dilakukan beberapa cara, yaitu : penagihan utang melalui pengadilan dan penagihan utang dengan cara lelang(Gatot Supramono: 148).

Adapun mekanisme penagihan hutangnya yakni sebagai berikut : (Gatot Supramono: 148)

a. Penagihan Utang Melalui Pengadilan

Adanya utang disebabkan sebagai perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban kepada kreditur dan debitur yang bertimbal balik. Peristiwa yang banyak terjadi dalam bidang utang piutang, pengembalian utang yang wajib dibayar oleh debitur tidak sesuai dengan yang diperjanjikan. Baik utang yang hanya dibayar sebagian dan pelunasan utang yang dilakukan jatuh tempo yang termasuk wanprestasi atau ingkar janji.

Adanya utang karena debitur tidak dapat memenuhi prestasinya merupakan masalah bagi kreditur tentang bagaimana cara debitur bersedia memenuhi kewajibannya. Pengadilan sebagai lembaga penyelesaian sengketa di kenal ada empat macam, yaitu pengadilan negeri, pengadilan agama, pengadilan militer, dan pengadilan tata usaha negara yang terdapat dalam Pasal 18 UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Gatot Supramono: 148)

b. Penagihan Utang Dengan Cara Lelang

Secara yuridis, lelang merupakan istilah penjualan di muka umum yang diatur dalam peraturan lelang sebagaimana dimuat dalam *Vendu Reglement* tanggal 28 Februari 1908 *Staatsblads* 1908 Nomor 189, yang berlaku sejak 1 April 1908. Lelang merupakan suatu bentuk penjualan barang yang dilakukan secara terbuka untuk umum dengan adanya harga penawaran yang semakin meningkat atau menurun dengan tujuan untuk mencapai harga tertinggi (Usman, Rachmadi, 2016).

Lelang dapat diajukan secara tertulis atau secara lisan yang sebelumnya di dahului dengan pemberitahuan tentang akan adanya pelelangan atau penjualan barang. Richard L. Hirshberg memberikan definisi lelang (*auktion*) merupakan penjualan umum dari properti bagi penawar tertinggi, yang dimana pejabat lelang bertindak terutama sebagai perantara dari penjual (Usman, Rachmadi, 2016).

Penjualan secara lelang bersifat *built in control*, objektif, kompetitif, dan autentik. Dikatakan *built in control* karena lelang harus diumumkan lebih dahulu dan dilaksanakan didepan umum. Bersifat objektif dimaksud karena lelang dilakukan secara terbuka dan tidak ada prioritas di antara pembeli lelang atau pemohon lelang.

Sedangkan dikatakan bersifat kompetitif karena pada dasarnya lelang menciptakan persaingan yang bebas diantara para penawar sehingga tercapai harga yang wajar sesuai dengan keinginan penjual, serta dikatakan bersifat autentik karena pelaksanaan lelang akan menghasilkan *Risalah Lelang* sebagai akta autentik oleh penjual lelang sebagai bukti dan bagi pembeli merupakan sebagai bukti pembelian yang akan digunakan untuk balik nama (Gatot Supramono: 148)

Sebagai sarana penjualan barang yang dilakukan secara terbuka, pranata lelang mempunyai dua fungsi sekaligus, yaitu fungsi privat dan fungsi publik. Fungsi privat pranata lelang sebagai wadah bagi pasar jual beli barang oleh masyarakat, sedangkan fungsi publik pranata lelang merupakan sarana penegakan hukum dan pengelolaan aset negara (Wijartama, 2018: 9).

2. Aturan Penagihan Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Dalam pengaturannya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tidak terdapat peraturan yang spesifik terkait mekanisme penagihan *Peer to peer lending*, namun OJK memiliki peraturan terkait larangan yang perlu diperhatikan saat *debt collector* melakukan penagihan hutang piutang kepada masyarakat secara langsung.

OJK melarang keras para *debt collector* menggunakan tindak kekerasan saat menagih kepada debitur yang menunggak. Hal ini tertuang dalam aturan Peraturan OJK (POJK) Nomor 6/POJK.07/2022 tentang perlindungan konsumen dan masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. Pada proses penagihan utang, *debt collector* dilarang melakukan 3 hal, di antaranya mengancam, melakukan tindak kekerasan, dan memberikan tekanan baik secara fisik maupun verbal (Artikel merdeka.com 2022).

Apabila *debt collector* melakukan hal tersebut maka akan dikenakan sanksi pidana. Pada pasal 45 POJK 6/POJK.07/2022 sanksi yang dimaksud berupa sanksi administrasi, yakni

peringatan tertulis, denda, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan produk atau kegiatan usaha, pencabutan izin produk dan pencabutan izin usaha (Artikel merdeka.com 2022)

Pengawasan Lembaga Pembiayaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), mengatakan debt collector yang akan melakukan penagihan utang secara langsung harus membawa dokumen lengkap (Artikel merdeka.com 2022). Dokumen yang dimaksud, yakni surat tugas, sertifikat kendaraan dan surat peringatan yang telah dikeluarkan. Apabila debt collector tidak membawa dokumen tersebut, maka masyarakat sebagai debitur berhak untuk melakukan penolakan dan melapor.

Apabila penagih hutang tidak memenuhi syarat dalam proses penagihan hutang piutang maka, masyarakat sebagai debitur dapat menolak penagihan hutang piutang tersebut. Jika debitur mengalami intimidasi, penganiayaan serta penghinaan dari pihak penagih hutang maka debitur dapat melaporkan segala jenis tindakan kekerasan tersebut kepada pihak kepolisian. (Yunus dalam wawancara merdeka.com).

3. Peraturan Bank Indonesia

Kegiatan *Peer to peer lending* merupakan suatu bentuk layanan pinjam meminjam uang dalam bentuk mata uang rupiah secara langsung antara pemberi pinjaman dan peminjam. Pengaturan *Peer to peer lending* masuk kedalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial dimana dinyatakan *Peer to peer lending* adalah salah satu penyelenggara teknologi finansial pada kategori pinjaman, pembiayaan, dan penyediaan modal (Kusuma, 2022:13-30)

Meskipun demikian peraturan Bank Indonesia belum mengeluarkan peraturan terkait bagaimana mekanisme penagihan dalam perjanjian *Peer to peer lending*. Peraturan Bank Indonesia hanya mewadahi peraturan Undang-undang terkait terbentuknya *Peer to peer lending*, proses pendaftaran, dan tentang penyelenggaraan teknologi finansial.

Dengan beberapa penjabaran terkait pembuktian bahwa benar adanya kekosongan norma pada hukum mekanisme penagihan dalam perjanjian *Peer to peer lending* dengan begitu perlu adanya pembentukan undang-undang yang mengatur tentang mekanisme penagihan dalam perjanjian *Peer to peer lending*.

Melihat keadaan saat ini yang begitu banyak ada kasus-kasus dalam penagihan yang dilakukan secara tidak pantas dan tidak beradab dalam *Peer to peer lending* dan kepentingan pembentukan undang-undang ini tentu saja untuk melindungi masyarakat yang dimana sebagai korban dalam kasus penagihan hutang secara tidak pantas.

Maka dari itu hukum Indonesia perlu membentuk sebuah undang-undang yang dimana menjabarkan secara terperinci dan juga signifikan terhadap mekanisme penagihan hutang piutang kepada masyarakat. Mekanisme penagihan merupakan salah satu bagian yang penting dalam menjaga ketertiban pinjam meminjam agar tidak adanya salah satu pihak yang merasa dirugikan. Rekomendasi mekanisme penagihan yang baik dapat dicontoh atau referensi mekanisme penagihan hutang piutang yang baik dapat dicontoh dalam tata cara penagihan hutang piutang secara Peer-to-Peer lending yang dikeluarkan oleh asosiasi fintek Indonesia atau AFTI. AFTI telah mengeluarkan sebuah buku pedoman yang didalamnya memuat sebuah mekanisme penagihan hutang piutang yang baik dan bermoral. Berikut adalah tatacara penagihan menurut AFTI yang dapat dijadikan referensi hukum bagi lembaga hukum Indonesia (AFTI Indonesia, 2018):

1. Itikad Baik Dalam Penagihan Atas Pinjaman Gagal Bayar

- a) Setiap Penyelenggara wajib memiliki dan menyampaikan prosedur penyelesaian dan penagihan kepada Pemberi dan Penerima Pinjaman dalam terjadi gagal bayar pinjaman.
- b) Setiap Penyelenggara wajib menyampaikan kepada Penerima Pinjaman dan Pemberi Pinjaman langkah-langkah yang akan ditempuh dalam hal terjadi keterlambatan pinjaman atau kegagalan pembayaran pinjaman antara lain:
 - 1) perihal pemberian surat peringatan;
 - 2) persyaratan penjadwalan atau restrukturisasi pinjaman;

- 3) korespondensi dengan Penerima Pinjaman secara jarak jauh (desk collection), termasuk via telepon, email, atau bentuk percakapan lainnya;
 - 4) perihal kunjungan atau komunikasi dengan tim penagihan; atau
 - 5) penghapusan pinjaman.
- c) Prosedur penyelesaian dan penagihan sebagaimana tersebut di atas wajib memperhatikan kepentingan Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman.
- d) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar penagihan atas pinjaman gagal bayar akan diatur kemudian di dalam pembaruan berkala Pedoman Perilaku.
2. Itikad Baik Penggunaan Pihak Ketiga Dalam Penagihan
- a) Setiap penyelenggara dilarang menggunakan pihak ketiga pelaksana penagihan (baik orang perseorangan maupun korporasi) yang tergolong dalam daftar hitam otoritas dan/atau dari Asosiasi.
 - b) Daftar hitam sebagaimana dimaksud di atas akan disusun kemudian di dalam pembaruan berkala Pedoman Perilaku.
3. Larangan Penggunaan Kekerasan Fisik Dan Mental
- a) Setiap Penyelenggara selaku kuasa Pemberi Pinjaman dilarang melakukan penagihan dengan intimidasi, kekerasan fisik dan mental, ataupun cara-cara lain yang menyinggung SARA atau merendahkan harkat, martabat, serta harga diri Penerima Pinjaman, di dunia fisik maupun di dunia maya (cyber bullying) baik terhadap Penerima Pinjaman, harta bendanya, ataupun kerabat dan keluarganya.
 - b) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk-bentuk praktik yang dilarang akan diatur kemudian di dalam pembaruan berkala Pedoman Perilaku.

Perlindungan hukum terhadap debitur dalam hal penagihan yang dilakukan secara melawan hukum

Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. (Dam purba, 2019).

Teori perlindungan hukum menurut Phillipus M. Hadjon, bahwa perlindungan hukum bagi rakyat adalah adanya tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan resprensif. Perlindungan Hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah adanya sengketa, dan mengarahkan tindakan pemerintah yang harus bersikap hati-hati dalam melakukan keputusan berdasarkan diskresi. Kemudian perlindungan resprensif, tujuannya mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan. (Satjipto Raharjo. 2000. : 54).

Jika masyarakat diberikan perlindungan hukum, maka harus dilakukan secara adil, sesuai dengan yang tertanam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yaitu atas dasar keadilan sosial yang terdapat dalam UUD 1945. Perlindungan hukum bagi konsumen *Peer to peer lending* didasarkan pada Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Hukum Perlindungan Konsumen. Dalam undang-undang tersebut mencakup segala aturan yang melindungi hak konsumen dan penyelesaian sengketa konsumen dan pelaku usaha. Dapat juga di dasarkan pada Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Desy Setyowati. 2019).

Kemudian adanya POJK No.77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, menjadikan sektor jasa keuangan juga turut bertanggung jawab. Secara yuridis, konsumen pengguna layanan *Peer to peer lending* sudah mendapatkan perlindungan hukum karena adanya peraturan dari otoritas jasa keuangan. Namun, banyak ditemukan kasus gagal bayar oleh penerima pinjaman, yang kemudian menjadi masalah baru terhadap cara-cara penagihan yang tidak sesuai dengan aturan. (Desy Setyowati. 2019)

Kewajiban dalam membayar pinjaman adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh konsumen sebagai penerima pinjaman, dengan adanya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh penyelenggara justru tidak dapat dibenarkan. Adapun bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh otoritas jasa keuangan apabila terdapat pelanggaran hukum yang dilakukan pihak penyelenggara *Peer to peer lending*, maka otoritas jasa keuangan akan memberikan teguran, yaitu berupa peringatan kepada penyelenggara yang dianggap menyimpang untuk segera memperbaikinya, kemudian memberikan informasi terkait hal yang merugikan konsumen ataupun masyarakat umum, juga meminta kepada pihak penyelenggara untuk menghentikan kegiatan usahanya tersebut. (Desy Setyowati. 2019)

Otoritas jasa keuangan juga melakukan pembelaan hukum untuk kepentingan masyarakat sebagai konsumen, yaitu pengajuan gugatan di pengadilan terhadap para pihak yang mengakibatkan kerugian tersebut. Selanjutnya, otoritas jasa keuangan memberikan kewajiban kepada pihak penyelenggara agar memiliki layanan berupa pengaduan konsumen, yang diatur dalam POJK No.18 Tahun 2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan. POJK ini sebagai wadah untuk menampung keluhan konsumen termasuk adanya potensi kerugian materiil atas produk dan/atau jasa pelaku usaha jasa keuangan yang dimanfaatkan oleh konsumen. Sedangkan untuk perusahaan penyelenggara *Peer to peer lending* ilegal, menurut Juru Bicara otoritas jasa keuangan Sekar Putih Djarot, secara umum otoritas jasa keuangan maupun satgas waspada investasi tidak dapat menindak, karena penyelenggara ilegal tidak ada yang mengawasi, juga tidak tunduk pada aturan atau kaidah apapun. Namun dalam keberadaan perusahaan ilegal menjadi perhatian bersama, sehingga penanganan dan pemberantasannya melalui Satgas Waspada Investasi yang merupakan gabungan dari 13 lembaga dan instansi. Oleh karena itu masyarakat tidak disarankan menggunakan jasa pinjaman ilegal dan dihindari agar lebih cermat terhadap *Peer to peer lending* ilegal, tetapi masih ada masyarakat yang dirugikan. (Desy Setyowati. 2019)

Hukum pidana sebagai ultimum remedium seringkali digunakan dalam praktik peradilan sebagai upaya untuk menanggulangi kejahatan, apabila tidak ada upaya-upaya hukum lain yang dapat dan mampu untuk mengatasi suatu kejahatan. Suatu sanksi pidana (punishment), dapat didefinisikan sebagai suatu nestapa atau penderitaan yang ditimpakan kepada orang yang telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana (Hendy,2020:167).

Dikarenakan tidak adanya Undang-undang yang pasti terkait dengan mekanisme penagihan hutang *Peer to peer lending* atau dengan kata lain adanya kekosongan norma hukum pada pengaturan tersebut. Maka untuk dapat memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat yang mendapat ketidakadilan saat dilakukan penagihan oleh pihak kreditur maka, referensi perlindungan hukum yang dapat digunakan adalah undang-undang ITE pasal 29 dan pasal 45B undang-undang nomor 19 tahun 2016.

Perlindungan hukum yang seharusnya diterima oleh nasabah menurut undang-undang ITE adalah pasal 29 dan pasal 45B undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik (UU ITE). Pasal 29 UU ITE berbunyi, “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang diajukan secara pribadi.”

Adapun pasal 45B UU ITE berbunyi “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang diajukan secara pribadi sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)” (Tri Intan, 2021: 67)

Selain referensi perlindungan hukum tersebut, terdapat sejumlah peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan pedoman untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum terhadap pelaku usaha atau Operator *Peer to peer lending* yang dapat menimbulkan permasalahan dalam hal perlindungan konsumen layanan *Fintech* secara hukum. Pengguna layanan *Peer to peer lending* dapat dilindungi secara hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan seperti,

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan POJK Nomor 77 Tahun 2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Terdapat tambahan kerangka hukum yang dapat dimanfaatkan sebagai perlindungan hukum bagi pengguna layanan *Peer to peer lending* selain aturan tersebut, seperti : (Tri Intan, 2021: 67)

1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen sebagai payung hukum bagi konsumen dalam berhubungan dengan pelaku usaha di berbagai tempat. Industri, salah satunya adalah industri jasa keuangan

2) Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi POJK Nomor 77/POJK.01/2016. Kelembagaan, kepemilikan, permodalan, perizinan, pembatasan pemberian kredit, pengelolaan penyelenggara teknologi informasi, pembatasan kegiatan, manajemen risiko, pelaporan, edukasi perlindungan konsumen, larangan, dan sanksi semuanya tercakup dalam peraturan OJK ini.

3) POJK No. 1/POJK/07/Tahun 2013, yaitu tentang Perlindungan Konsumen di Industri Jasa Keuangan. Dengan berpegang pada prinsip: Transparansi, Perlakuan Adil, Keandalan, Kerahasiaan dan Keamanan Data/Informasi Pelanggan, Penanganan Keluhan dan Penyelesaian Sengketa untuk Pelanggan Secara Sederhana, Cepat, dan dengan Biaya yang Wajar.

4) Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016

5) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (KOMINFO) Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Sistem Elektronik Informasi Pribadi.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan dari pembahasan yang telah diuraikan diatas mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Terkait Mekanisme Penagihan Piutang Oleh Kreditur Dalam Perjanjian *Peer to peer lending* maka dapat ditarik kesimpulan yaitu sebagai berikut :

1. Pengaturan mekanisme penagihan dalam perjanjian *peer to peer lending* didalam perspektif hukum perdata, hukum OJK, serta hukum PBI tidak diatur secara jelas mengenai pengaturan mekanisme penagihan hutang dalam perjanjian *peer to peer lending*, namun dalam hukum perdata diatur mengenai penagihan hutang yang dapat dilakukan melalui pengadilan dan melalui lelang. Adapun referensi hukum terkait mekanisme penagihan hutang dalam perjanjian *peer to peer lending* dapat dilihat dalam buku pedoman perilaku pemberian layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi secara bertanggungjawab dimana penagihan hutang dilakukan dengan itikad baik, tidak menggunakan kekerasan fisik dan mental serta dalam hal penggunaan pihak ketiga yang harus dengan itikad baik.
2. Perlindungan hukum terhadap debitur dalam hal penagihan yang dilakukan secara melawan hukum belum ada peraturan yang pasti dalam undang-undangnya. Maka dari itu diperlukan pembentuk segera untuk Undang-undang mekanisme penagihan dalam perjanjian *peer to peer lending*. Sebelum dibentuknya undang-undang yang tepat maka diperlukan referensi dalam menanggapi permasalahan-permasalahan yang ada saat ini, beberapa referensi hukum dalam menindaklanjutinya yaitu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan POJK Nomor 77 Tahun 2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Selain itu juga ada referensi perlindungan hukum yang dapat diambil dari hukum perlindungan konsumen seperti berikut, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, POJK No. 1/POJK/07/Tahun 2013, yaitu tentang Perlindungan Konsumen di Industri Jasa Keuangan. Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Peraturan

Menteri Komunikasi dan Informatika (KOMINFO) Nomor 20 Tahun 2016 Tentang
Perlindungan Data Sistem Elektronik Informasi Pribadi.

Saran

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan berkaitan dengan kesimpulan dari penelitian ini yakni sebagai berikut :

1. Masyarakat harus lebih berhati-hati dalam memilih layanan *peer to peer lending* dan sebelum menggunakannya harus memahami terlebih dahulu mengenai persyaratan, ketentuan dan akibat yang ditimbulkan dari layanan *Peer to peer lending* dimana hal ini bertujuan untuk mengurangi resiko yang tidak diinginkan.
2. Kepada pemerintah khususnya dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan perlu untuk melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai resiko layanan *Peer to peer lending* sehingga masyarakat dapat dengan bijak menggunakan layanan ini dan terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan.

Para penegak hukum dalam hal ini aparat pembuat peraturan hukum agar dapat membuat suatu pengaturan hukum yang jelas terhadap layanan *Peer to peer lending* sehingga dapat memberikan suatu kejelasan di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adilah, H. (2021). Perjanjian Pinjaman Online Ditinjau Dari Asas Good Faith Berkaitan Dengan Pasal 1321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum*, 4(1), 126-132.
- Ahmad, Z. 2016. *Hukum Perlindungan Konsumen dan Problematikanya*, (Jakarta:GH Publishing, 2016).
- Ana, Toni, dkk. 2020. *Fintech syariah:Teori dan Terapan* penerbit scorpindo Media Pustaka.
- Aprita, S. (2021). *Peer to peer lending* Dalam Menyalurkan Pendanaan Pada Usaha Kecil Dan Menengah. *Jurnal Hukum*. 16(1), 37-60.
- Arigato Dimitri Batistuta, C. S. (2021). Pemberitaan Kasus Pinjaman Online Ilegal Di Media Berita Elektronik. *Intelektiva : E-Journal*, 3(4), 23-32.
- Arvante, J. Z. (2022). Pinjaman Online dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pinjaman Online. *IMPHI Law Jurnal*, 2(1), 74-87.
- Dewa Ayu Trisna Dewi, N. K. (2021). Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Pinjaman Online Terkait Bunga Pinjaman Dan Hak-hak Pribadi Pengguna. *Jurnal Hukum Kenotariatan*, 6(2), 259-270.
- Diantha, I. M. 2017. *Metode penelitian hukum normatif dalam justifikasi teori hukum*. Jakarta: Prenada Media Grup.
- Djoni S, Gazali R. U. 2016. *Hukum Perbankan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Fajar, M. 2015. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Gatot S., 2014. *Perjanjian utang piutang*. Kencana, Jakarta
- Hadisoepaoto, H, *Segi Hukum Perdata : Pokok Pokok Hukum Perdata dan Hukum Jaminan*; Yogyakarta Liberty 1984 Hal 50
- Hidayat, N. (2021). Kebijakan Financial Inclusion Terhadap Pelaku Ekonomi Kreatif Yang Unbankable Di Indonesia. *E-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, 4(2), 386-396.
- Hsueh, H.-W. (2017). Effect of *Fintech* on the Productivity in the Taiwan Banking Industry. *International Journal of e-Education, e-Business, e-Management and e-Learning*, 7(4), 255-263.
- Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi* . Bandung: Alfabeta.
- Jono. 2015. *Hukum Kepailitan*, cet. 4, Sinar Grafika, Jakarta.
- Kristiyanti, C. T. 2011. *Hukum perlindungan konsumen*. jakarta: sinar grafika.

- Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Diseminasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Di Desa Sidetapa Terkait Urgensi Pencatatan Perkawinan Untuk Memperoleh Akta Perkawinan. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 8(1), 138-155.
- Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Penggunaan Media Sosial Secara Bijak Sebagai Penanggulangan Tindak Pidana Hate Speech Pada Mahasiswa Jurusan Hukum Dan Kewarganegaraan Fakultas Hukum Dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Media Ganesha FHIS*, 1(1), 57-62
- Mariam, D.B, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III, Tentang Hukum perikatan dan penjelasannya, Alumi, Bandung, 1996, hlm. 323.
- Muhaimin. 2020. Metode Hukum Penelitian. Mataram: Mataram Universitas Press.
- Nisantika, R. (2022). Tinjauan Yuridis Tentang Pencantuman Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Pada Financial Technology Berbasis *Peer to peer lending*. *Jurnal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, 5(3), 162-177
- Santosa, I. K. D., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2021). Pengaturan Asas Oportunitas Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 9(1), 70-80.
- Situmorang, N. S. (2020). Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Simpan Pinjam Online (*Fintech*). *Jurnal Hukum PATIK*, 9(3), 147-159.
- Sonata, D. L. (2014). Penelitian Hukum Normatif Danempiris: Karakteristik Khas Dari Metodemeneliti Hukum. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), 15-21.
- Sugiadnyana, P. R., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Penyelesaian Sengketa Pulau Batu Puteh Di Selat Johor Antara Singapura Dengan Malaysia Dalam Perspektif Hukum Internasional. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 6(2), 542-559.
- Suminar. (2021). Tanggung Jawab Kreditur atas Penyebaran Data Nasabah dalam Pinjaman Online (*Fintech*) Ditinjau dari Buku III KUHPerdara dihubungkan dengan UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Prodising Ilmu Hukum. jurnal hukum*, 7(1), 137.